

DEMOKRASI TERPIMPIN MENURUT KH. IDHAM CHALID DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 029 SJ	No. REG : S-2011 / SJ / 029
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Rasyid Hidayatullah
NIM: C03206036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA

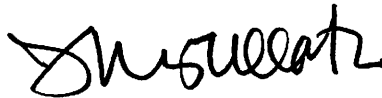
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang telah ditulis oleh Rasyid Hidayatullah (NIM: CO3206036)
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

Surabaya, 8 Juni 2011

Pembimbing,



Amirullah, S.Ag. MH.
NIP. 197201012003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Hidayatullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,


Amirullah, S.Ag, MH.

NIP. 197201012003121002

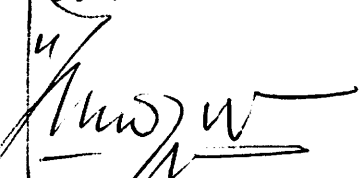
Sekretaris



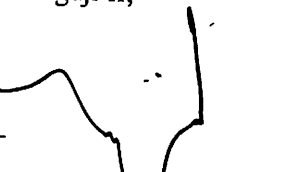
Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001


Penguji I,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001


Penguji II,


Dr. H. Sahid, H., M.Ag
NIP. 196803091996031002

Pembimbing,


Amirullah, S.Ag, MH.
NIP.197201012003121002

Surabaya, 22 Juli 2011
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Prof. Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

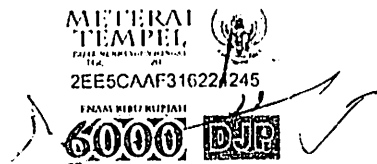
Nama : Rasyid Hidayatullah
NIM : CO3206036
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **DEMOKRASI TERPIMPIN MENURUT KH. IDHAM CHALID DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,



Rasyid Hidayatullah

5. Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, Cet II. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
 6. Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
 7. Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Sala: Jatayu, 1985
 8. Nur Kholik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-1926: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Arruz Press, 2010
 9. M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta : Gramedia, 1994
 10. Soebagio IN. *KH. Masjkur: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
 11. Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1999
 12. Andree Feillard, *NU vis a vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2004
4. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, baik sumber primer maupun sumber sekunder, penulis berusaha membaca dan menganalisis pemikiran Idham Chalid yang sesuai dengan tema skripsi. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pembacaan teks serta melakukan catatan penelitian. Teknik

politik formal, tapi juga partai mereka dibubarkan seperti Masyumi dan PSI dan tokoh-tokoh mereka dipenjarakan bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas.

Dengan terbentuknya DPRGR pada April 1960, proses kristalisasi politik di kalangan umat mendapatkan momentum yang kritis dan menentukan, dan proses itu mencapai titik puncak pada akhir 1960 sewaktu Masyumi bubar. Kolaborasi antara Soekarno dan partai-partai Islam, yang berlangsung terus sampai jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Pada periode sulit ini partai-partai Islam dapat dikatakan sedang berada di bawah pengaruh kuat NU. Strategi politik NU yang menggunakan Doktrin Pesantren dan Implementasinya dalam Politik Praktis pada periode Demokrasi Terpimpin. KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh yang berperan dominan dalam perjuangan NU pada waktu diadakannya musyawarah wilayah tentang masuk tidaknya NU ke dalam DPRGR, strateginya adalah yang mendapat dukungan besar. Dalam buku Anggaran Dasar NU dikatakan bahwa memuliakan yang tinggi dan mengasihi yang rendah yang merupakan bagian dari tugas Syuriah dalam rangka menguatkan tali persaudaraan di kalangan para Ulama NU. Doktrin ini dengan sendirinya telah memperkuat posisi para sesepuh ulama (Kiai Wahab dan Idham) yang loyal kepada Presiden Soekarno. Idham berpandangan bahwa dalam menghadapi Demokrasi terpimpin, Umat Islam dihadapkan pada dua macam ijtihad politik yang berbeda. Ijtihad pertama berkesimpulan bahwa umat Islam lebih baik masuk ke dalam sistem demi kepentingan Islam, sedangkan Ijtihad kedua berpendapat bahwa demi kepentingan Islam maka umat Islam harus melawan sistem.

Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi anggota beberapa komunitas Indonesia, terutama bagi orang-orang Jawa, mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam berbagai skema rumit yang disampaikan presiden itu ketika mengupas cara pandang secara panjang lebar Manipol-USDEK, yang menjelaskan arti dan tugas-tugas khusus tahapan sejarah sekarang ini.

Barangkali daya tarik terpenting Manipo-USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Mereka tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang pokok ialah bahwa presiden menawarkan sesuatu pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju. Nilai-nilai dan pola-pola kognitif berubah terus dan saling berbenturan, sehingga timbul

keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang dogmatis dan skematis mengenai apa yang baik dalam politik. Satu tanggapan umum terhadap Manipol-USDEK ialah bahwa Manipol-USDEK bukanlah merupakan ideologi yang sangat baik atau lengkap tetapi pada akhir tahun 1950-an dibutuhkan sebuah ideologi dalam kerangka pembangunan Indonesia.

Apakah butir-butir Demokrasi Terpimpin itu? Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Presiden Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah :

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan Negara.
2. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat bangsa, dan Negara.

Sedangkan dalam amanatnya pada 22 April 1959, Presiden RI pertama tersebut membeberkan tidak kurang dari 12 definisi tentang Demokrasi terpimpin. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya telah disampaikan oleh pemerintahan Djuanda sebelumnya dan nampaknya disetujui oleh Soekarno. Satu definisi mengatakan “Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi, atau, dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sedangkan dalam kesempatan lain Soekarno

2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
4. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
6. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan.

Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak untuk diakui PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan partai rakyat nasional Djodi Goondokusumo. Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

Demikianlah kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai-partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional pada masa itu. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh peran

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Pertama, strategi *akomodatif justifikatif* terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan "garis keras" umat Islam. *Kedua*, strategi *isolatif-oposisional*, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. *Ketiga*, strategi *integratif-kritis*, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Sikap politik Idham yang akomodatif dan "berfilosofi air" tersebut merupakan prinsip politik yang bersandarkan pada fiqh, yang secara konseptual dirumuskan sebagaimana di bawah ini:

sebaliknya, reaksi terhadap NU juga merupakan reaksi terhadap sebagian pemikiran dan sikap politik Idham.

Dengan adanya prinsip ini NU selalu mengambil sikap akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim dalam berhadapan dengan spektrum budaya apapun.

Pengaruh gerakan dan pemikiran NU yang akomodatif dan kompromistis tersebut, disinyalir oleh para pakar dan pengamat sangat berpengaruh dalam perjalanan politik NU di Indonesia. Implikasi penting peranan gerakan dan pemikiran NU ini membuat NU menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik Indonesia yang di mata orang lain cenderung "kontroversial, polemis, dan akomodatif", terutama ketika NU memberikan "*treatment*" terhadap kekuasaan.

Salah satu ciri melekat dari pendekatan yang *fiqh oriented* adalah bahwa paradigma keagamaan NU selalu dikalkulasikan atas pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *maṣlahah* dan *mafsadah*. Melihat dari gerakan pemikiran keagamaan dan pertimbangan-pertimbangan hukum NU tersebut, penulis mengidentifikasi dan meneliti sejauhmana pemikiran NU tersebut berpengaruh terhadap sistem tata negara di Indonesia.

